



IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA SUKAHENING

Iwan Sugianto

Keuangan & Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Tanjungkerta, Indonesia

Email: sugiantoiwan729@gmail.com

Abstract

Assistance in the financial reporting of village administration is a strategic effort to enhance the capacity and accountability of village governments in managing finances transparently and in accordance with regulations. This study aims to identify the effectiveness of implementing financial reporting assistance for village officials, particularly through the use of the Village Financial System application (Sistem Keuangan Desa or SISKEUDES). A participatory approach was employed, using observation, interviews, and document review methods to compare financial reporting practices before and after the implementation of assistance. The results show a significant improvement in the technical capabilities of village officials, timeliness in financial report submissions, and better organization of administrative documents. Furthermore, the program encouraged public transparency by publishing summary reports to the community. Existing challenges include limited human resources and the need for continuous training. Therefore, financial reporting assistance has proven to be a relevant and effective intervention in strengthening good village financial governance.

Keywords: *assistance, financial reporting, village government, SISKEUDES, accountability*

Abstrak

Pendampingan dalam pelaporan administrasi keuangan desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara transparan dan sesuai regulasi. Penelitian atau kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi pendampingan yang dilakukan terhadap aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan, terutama melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan teknik observasi, wawancara, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan sebelum dan sesudah pendampingan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan kemampuan teknis perangkat desa, ketepatan waktu dalam pelaporan, serta perbaikan dalam pengarsipan dokumen administrasi. Selain itu, kegiatan ini turut mendorong transparansi publik melalui publikasi laporan keuangan desa. Kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan SDM dan perlunya pelatihan lanjutan. Dengan demikian, pendampingan terbukti menjadi intervensi yang relevan dan efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang baik.

Kata Kunci: pendampingan, pelaporan keuangan, pemerintahan desa, SISKEUDES, akuntabilitas.



LATAR BELAKANG

Pelaporan administrasi keuangan desa merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi. Namun, banyak desa masih mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dari pihak yang kompeten untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, pengelolaan administrasi keuangan desa menjadi aspek yang sangat penting. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah, dituntut untuk dapat mengelola keuangan desa secara tertib, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan regulasi turunannya.

peningkatan alokasi dana tidak selalu diiringi dengan kemampuan administrasi keuangan yang memadai. Banyak desa masih menghadapi kendala dalam penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Masalah yang sering muncul antara lain adalah ketidaksesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan, keterlambatan pelaporan, hingga rendahnya kapasitas SDM desa dalam menggunakan sistem pelaporan digital seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah desa yang menghadapi kendala dalam penyusunan dan pelaporan administrasi keuangan. Kendala tersebut antara lain terbatasnya pemahaman aparatur desa terhadap sistem dan prosedur pelaporan keuangan, kurangnya tenaga teknis yang memadai, serta minimnya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada keterlambatan laporan, kesalahan administrasi, bahkan potensi terjadinya penyimpangan.

Menyikapi kondisi tersebut, diperlukan implementasi pendampingan pelaporan administrasi keuangan desa secara sistematis dan terstruktur. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa dengan benar dan tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa demi kesejahteraan masyarakat.

Situasi ini menuntut adanya pendampingan intensif agar desa mampu menyusun laporan administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Pendampingan ini mencakup pelatihan, bimbingan teknis,

asistensi penyusunan dokumen, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan keuangan desa.

Tujuan utama dari implementasi pendampingan ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola keuangan serta mencegah terjadinya penyimpangan administrasi dan keuangan. Selain itu, pendampingan ini juga mendukung akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based approach), dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pelaporan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Observasi Awal dan Identifikasi Masalah

Tim pelaksana melakukan observasi dan wawancara langsung dengan aparatur desa untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaporan keuangan, termasuk kesulitan dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, penyusunan SPJ, dan pemahaman regulasi.

b. Perencanaan Program Pendampingan

Setelah analisis kebutuhan dilakukan, disusun program pendampingan yang mencakup pelatihan teknis, bimbingan praktis, dan penyediaan materi panduan. Perencanaan dilakukan bersama pemerintah desa agar kegiatan sesuai dengan kondisi dan waktu kerja perangkat desa.

c. Pelaksanaan Pendampingan

Pelatihan Teknis: Diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi keuangan desa, format pelaporan, serta penggunaan aplikasi SISKEUDES.



Gambar 1. Pengisian Daftar Hadir

Pendampingan Lapangan: Tim melakukan kunjungan berkala ke desa untuk mendampingi langsung proses penyusunan dan input data laporan keuangan.



Simulasi dan Praktek Langsung: Aparatur desa diberi simulasi menyusun laporan triwulanan hingga tahunan menggunakan data riil dari desa.



Gambar 2. Pelaksanaan Pendampingan

d. Monitoring dan Evalua

Monitoring dilakukan setiap bulan untuk menilai perkembangan kemampuan perangkat desa dan mengidentifikasi kekurangan. Evaluasi akhir dilakukan melalui kuesioner dan wawancara untuk mengukur keberhasilan kegiatan pendampingan.



Gambar 3. Menilai Perkembangan

2. Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara: Dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan pendamping lokal desa.
- Observasi langsung: Saat kegiatan penyusunan laporan keuangan berlangsung.
- Studi dokumen: Melihat hasil pelaporan sebelum dan sesudah pendampingan.

3. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Lokasi: Pemerintahan Desa Sukahening, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya.

Waktu: Kegiatan dilaksanakan selama 2 bulan, dari Februari hingga Maret 2025.

Metode ini dirancang agar mendukung keberlanjutan praktik pelaporan yang baik oleh aparatur desa, bukan hanya saat didampingi, tetapi juga secara mandiri setelah kegiatan selesai.

PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Pendampingan pelaporan administrasi keuangan yang dilakukan selama kurun waktu tiga bulan menghasilkan beberapa capaian signifikan, antara lain:

a. Peningkatan Kompetensi Aparatur Desa

Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, aparatur desa (khususnya bendahara, sekretaris desa, dan kaur keuangan) mengalami peningkatan kemampuan dalam:

- Menyusun dokumen keuangan seperti RAB, SPJ, dan Laporan Realisasi Anggaran,
- Mengoperasikan aplikasi SISKEUDS secara mandiri,
- Memahami siklus dan mekanisme pelaporan yang sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

b. Ketertiban Administrasi dan Pengarsipan

Sebelumnya dokumen keuangan belum terorganisir dengan baik, namun setelah pendampingan:

- ✓ Dokumen pelaporan keuangan sudah diklasifikasikan sesuai jenis (belanja, pendapatan, dll),
- ✓ Arsip disusun rapi dalam map dan folder digital, sehingga mempermudah proses audit atau pemeriksaan dari pihak kecamatan/inspektorat.

c. Tepat Waktu dalam Penyampaian Laporan

Sebelum pendampingan, laporan keuangan triwulanan sering terlambat diserahkan ke kecamatan. Setelah pendampingan:

- ✓ Desa mampu menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu sesuai batas akhir pelaporan,
- ✓ Proses pencairan tahap berikutnya menjadi lebih cepat.

d. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Sebagian desa mulai mengumumkan ringkasan laporan keuangan melalui papan informasi desa dan musyawarah desa. Hal ini mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa.

2. Pembahasan

Pendampingan yang dilakukan terbukti efektif dalam:

- Mengatasi rendahnya kapasitas teknis aparatur desa dalam pelaporan keuangan,



- Meningkatkan efisiensi waktu dan mutu pelaporan,
- Mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan.

Penting dicatat bahwa keberhasilan ini juga didukung oleh:

- Dukungan kepala desa dan perangkat lain,
- Kolaborasi dengan pendamping lokal desa,
- Ketersediaan sarana seperti komputer dan jaringan internet.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan:

- Tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan akuntansi,
- Ketergantungan terhadap satu atau dua orang kunci (misalnya bendahara),
- Masih diperlukan pelatihan lanjutan untuk pelaporan berbasis digital secara penuh.

A. Kondisi Sebelum Adanya Pendampingan Pelaporan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa

Sebelum adanya kegiatan pendampingan, sebagian besar pemerintahan desa menghadapi berbagai kendala serius dalam pelaporan administrasi keuangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama:

- a) Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur Desa
Banyak perangkat desa belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang administrasi dan keuangan. Akibatnya, mereka kesulitan dalam menyusun laporan seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan Laporan Realisasi APBDes secara sistematis dan sesuai ketentuan.
- b) Kurangnya Pemahaman terhadap Regulasi Keuangan Desa

Aparatur desa cenderung kurang memahami regulasi terkait, seperti:

- Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- serta pedoman teknis pelaporan dana desa dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan, duplikasi anggaran, dan pelaporan yang tidak sesuai format.

1. Dokumentasi Manual dan Tidak Terstandar
Sebelum diterapkannya sistem digital seperti SISKEUDES, pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Banyak desa tidak memiliki arsip administrasi yang rapi, sehingga

menyulitkan dalam proses audit atau pertanggungjawaban.

2. Minimnya Pengawasan dan Pendampingan Teknis
Ketiadaan pendamping teknis menyebabkan banyak desa bekerja secara otodidak dalam menyusun pelaporan. Ini membuat proses menjadi lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan administratif.
3. Tingkat Keterlambatan Laporan Tinggi

Akibat berbagai kendala di atas, banyak desa tidak mampu menyelesaikan pelaporan keuangan tepat waktu. Hal ini berdampak pada terhambatnya pencairan anggaran tahap selanjutnya, serta munculnya temuan dalam pemeriksaan dari Inspektorat atau BPK.

B. Kondisi Setelah Adanya Implementasi Pendampingan Pelaporan Administrasi Keuangan Pemerintahan Desa

Setelah dilakukan pendampingan secara intensif, terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola pelaporan administrasi keuangan di pemerintahan desa. Berikut adalah hasil-hasil positif yang terlihat pasca-implementasi:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Desa

Pendampingan melalui pelatihan teknis dan bimbingan lapangan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada perangkat desa mengenai:

- Cara menyusun laporan keuangan sesuai regulasi (Permendagri No. 20 Tahun 2018),
- Penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pencatatan dan pelaporan,
- Pemahaman terhadap siklus APBDes dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Dampak: Aparatur desa mulai mampu menyusun laporan secara mandiri dan tepat waktu.

2. Standarisasi Proses dan Dokumen Pelaporan
Dengan bantuan pendamping, desa-desa mulai menerapkan sistem pelaporan yang lebih tertib dan terstandar, termasuk dalam pengarsipan dokumen dan pembuatan laporan SPJ, RAB, serta Laporan Realisasi Anggaran.

Dampak: Laporan menjadi lebih mudah diverifikasi oleh kecamatan dan pihak inspektorat.

3. Ketepatan Waktu dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Jika sebelumnya banyak desa terlambat dalam pelaporan triwulan atau tahunan, kini ketepatan waktu meningkat karena perangkat desa sudah memahami alur dan tenggat waktu pelaporan.



Dampak: Pencairan dana tahap berikutnya tidak lagi tertunda, dan proses pembangunan desa berjalan lebih lancar.

4. **Transparansi dan Akuntabilitas Meningkat**

Beberapa desa mulai mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau website. Ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran transparansi dalam tata kelola keuangan.

Dampak: Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa ikut meningkat.

5. **Terbangunnya Pola Kerja Kolaboratif**

Pendampingan menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara desa dengan pendamping lokal desa, tenaga ahli dari kecamatan, dan dinas terkait. Pendampingan juga mendorong partisipasi aktif BPD dalam pengawasan laporan keuangan.

Dampak: Tata kelola desa menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif.



Gambar 4. Hasil Pendampingan Pelaporan Administrasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendampingan pelaporan administrasi keuangan desa terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, terutama dalam aspek penyusunan laporan, penggunaan aplikasi SISKEUDES, serta pengarsipan dokumen keuangan yang tertib dan terstruktur.
2. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap ketepatan waktu pelaporan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.
3. Kolaborasi antara pemerintah desa, pendamping lokal desa, dan tim pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan pendampingan. Keberadaan perangkat yang aktif dan responsif sangat membantu dalam mempercepat proses belajar dan penerapan praktik pelaporan yang baik.

4. Meskipun hasilnya cukup menggembirakan, masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan SDM dan akses terhadap teknologi. Oleh karena itu, pendampingan lanjutan dan pelatihan berkala tetap dibutuhkan agar kualitas tata kelola keuangan desa terus meningkat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada 1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah 2. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarokiyah 3. Kepada Desa beserta Staf Desa Sukahening

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, L. D., Purnamasari, F., & Faradillah. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ABMS/article/view/47469>
<https://repository.unsri.ac.id/147114/>
Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 4(1), 1–7.
- Imelda, I., Yani, E., & Marlina, M. (2024). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 4(2), 35–41.
- Imelda, I., Yani, E., & Marlina, M. (2024). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ulak Kembahang II. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 4(2), 70–77.
- Junaidi. (2020). Pendampingan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ladongi, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. *Resona: Jurnal Jurnal ABDIMISI*, 6(1), 137–144.
- Charolina, Y., & Yuniarti, U. K. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa di Desa Muara Pulutan, Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 45–52.
- Jurnal Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 35–41.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Permendes PDPT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Jakarta: Kemendes PDPT.
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *Budimas*:



- Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 46–53.
- Natariasari, R., Savitri, E., & Nasir, A. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Kas dan Laporan Arus Kas. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(4), 1037–1042.
- Prasetya, E. R., Purnomo, L. I., & Virlandana, R. (2024). Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rangkasbitung. *Jurnal ABDIMISI*, 6(1).
- Prasetya, E. R., Purnomo, L. I., & Virlandana, R. (2024). Pendampingan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Rangkasbitung.
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162.
- Puspitaningtyas, Z., Astuti, M. A., & Hadi, R. E. (2017). Pengaruh Evaluasi Kebijakan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa dan Kompensasi terhadap Kinerja Tenaga Fasilitasi Pendampingan Desa di Kabupaten Lumajang. *Majalah Ilmiah DIAN ILMU*, 17(1), 19–37.